BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Persoalan keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama dalam penyelengaraan otonomi daerah, meskipun diakui bahwa berbagai variabel lain juga mempengaruhi kemampuan keuangan daerah, seperti sumber daya manusia, organisasi, manajemen, sarana dan prasarana serta penunjang lainnya. Pentingnya keuangan daerah berkaitan dengan kenyataan bahwa mobilisasi terhadap sumber-sumber daya keuangan daerah dipandang sebagai bagian yang paling krusial dalam penyelengaraan keuangan daerah.

Pemerintah daerah diberi keleluasan untuk mengelola keuangan daerah sampai sejauh mana daerah itu dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhan keuangan daerah tanpa harus mengantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat masih berperan dalam memberikan bantuan dana kepada pemerintahan daerah melalui dana perimbangan. Pemerintah pusat tidak bisa ikut serta dalam pengelolaan keuangan daerah dikarenakan adanya otonomi daerah.

Otonomi daerah adalah hak,wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepenting masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. (Deddi Noordiawan : 2010)

Otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintahan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemeratanaan, keadilan, keistimewaan, dan keanekaragaman

daerah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah maka otonomi daerah dititik beratkan pada daerah kabupaten atau kota karena daerah kabupaten atau kota berhubungan langsung dengan masyarakat.

Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien, mampu mendorong peran serta mesyarakat dalam membangun, serta meningkatkan kemampuan pemerintah daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. (Sopian : 2007)

Guna mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambunagan, pemerintah daerah memerlukan sumber pendanaan sebagai salah satu penyokong utama terciptanya pembangunan daerah yang direncanakan. Pendanaan tersebut terwujud nyata dalam PAD menjadi salah satu sumber daya daerah guna mewujudkan pembangunan daerah.

PAD adalah penghasilan asli daerah tahunan pemerintah daerah yang dikelola oleh pemerintah sendiri untuk membiayai kepentingan daerahnya sendiri. (Deddi Noordiawan : 2010)

PAD yaitu fungsi pendapatan yang berarti bahwa daerah harus di bisa untuk mengelola keuangan sendiri dan harus bisa mengoptimalkan pendapatan disetiap tahun agar bisa mendanai kebutuhan denagn mandiri tanpa meminta bantuan dari pemerintah pusat/provinsi. Maka dari itu pemerintah daerah harus bisa mengoptimalkan PAD dengan cara mengoptimalkan kinerja keuangan daerah.

Kinerja keuangan adalah Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusanskema strategis suatu organisasi.

Kinerja keuangan pemerintah wajib untuk mempertanggungjawabkan dengan sendirinya dipenuhi dengan menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil program yang dilaksanakan kepada wakil rakyat dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang memang ingin menilai kinerja pemerintah.

Kinerja keuangan harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah daerah. Jadi kinerja keuangan daerah harus benar-benar dilakukan sebaik mungkin seperti memtransparansi keuangan pemerintah dan selalu mengaudit kinerja pemerintah setiap tahun. Boediono menegaskan, dengan ada audit dari BPK setiap tahun pemerintah harus selalu melihat kembali hasil audit BPK untuk kemudian diikuti dengan pembenahan. Hal itu sangat penting mengingat kinerja keuangan dari pusat ke daerah sudah sangat besar dan harus diikuti kinerja pemerintah yang bersih dan akuntabel. (Boediono : 2008)

Sementara itu, menurut Bambang selaku Kepala Bidang Pendapatan mengatakan bahwa daerah Kabupaten Bandung kinerja keuangan kurang baik, dan kurang bisa mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2006-2010. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Tinjauan Atas Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bandung".**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasikan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Kinerja keuangan Kabupaten Bandung belum memenuhi kriteria kinerja keuangan yang baik
2. Kabupaten bandung kurang bisa mengoptimalkan PAD .

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja keuangan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung berdasarkan rasio kemandirian.
2. Bagaimana upaya Kabupaten Bandung dalam meningkatkan potensi PAD.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dirumuskan diatas dapat diketahui bahwa Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan berkaitan dengan masalah yang sudah diuraikan diatas. Selain itu, hasil penelitian ini akan penulis gunakan sebagai bahan untuk penulisan Laporan Tugas Akhir yang akan diajukan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian Laporan Tugas Akhir.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan Daerah Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui upaya Kabupaten Bandung dalam meningkatkan PAD.

1.4 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dinas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran berupa bahan masukan dan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dalam mengelola Dinas di masa yang datang supaya hasil yang dicapai bisa lebih baik dari sebelumnya.

1.4.1 Kegunaan Akademis

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan dapat membandingkan antara realita yang ada di perusahaan dengan ilmu yang telah ditekuni selama mengikuti perkuliahan di UNIKOM.

2. Bagi Pihak Lain

   Penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan peneliti selanjutnya dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan pengendalian intern pemberian kredit yang dapat dijadikan referensi.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kabupaten Bandung yang beralamat komplek pemda kabupaten bandung Jl.soreang KM.17 No 155 Tlp.5893326.

1.5.2 Waktu Penelitian

Tabel 1.1

Waktu pelaksanaan Penelitian

No	Kegitan	Bulan				
		Maret 2012	April 2012	Mei 2012	Juni 2012	Juli 2012
I	**Tahap Persiapan :**					
	1. Membuat proposl tugas akhir.	■				
	2. Menentukan tempat penelitian	■	■	■		
II	**Tahap Pelaksanaan :**					
	1. Mengajukan outline dan	■	■			
	proposal tugas akhir	■	■			
	2. Meminta surat pengantar		■	■	■	
	ke Perusahaan		■	■	■	
	3. Penelitian di Perusahaan		■	■	■	■
	Bimbingan tugas akhir		■	■	■	■
III	**Tahap Pelaporan :**					
	1. Menyiapkan draft tugas akhir	■	■	■	■	■
	2. Sidang tugas akhir					■
	3. Revisi tugas akhir		■	■	■	■
	4. Penyerahan tugas akhir					■